



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : NURHEMA

NIK : 1209196004760001

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Jabatan : KETUA

Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat

Tanggal Kirim : 13 Oktober 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Oktober 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHEMA
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 248468

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/54 m2 di KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/144 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/44 m2 di KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	298.000.000
1. MOTOR, VARIO HONDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. MOBIL, TERIOS DAIHATSU/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	136.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	899.410.298
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.534.010.298
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.534.010.298

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui _____, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.